

**MANAJEMEN *ELECTRONIC GOVERNMENT***  
**DI KABUPATEN SEMARANG**

Nadila Olivia Intan Putri, Hardi Warsono  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Electronic Government is an effort to organize electronic-based government by utilizing the development of technology and information in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. Semarang regency is one of the districts in Indonesia that implement Electronic Government in running its government affairs. The purpose of this study is to know how the Electronic Government management process, as well as the driving factors and inhibiting factors in applying Electronic Government in Semarang regency. The method used in this research is descriptive-qualitative method. The results showed that the management of Electronic Government in Semarang Regency is in the first stage, that is preparation. This condition can be seen from the planning, organizing, directing and controlling in the Office of Communications and Informatics Semarang regency that has not been optimal. This is indicated by the planning process that is still experiencing difficulties in the preparation of the master plan, insufficient human resources, the lack of optimal leadership, budget and infrastructure.*

**Keywords:** *Electronic Government, Management, Human Resources.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu mobilitas informasi adalah aspek pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Semarang membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dalam meningkatkan pelayanan. Salah satu cara yang ditempuh adalah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, yaitu internet.

Aplikasi internet yang sudah digunakan untuk pemakaian lingkungan pemerintahan dikenal dengan *E-Government*. Perkembangan teknologi yang semakin maju mampu membuka kesempatan yang semakin luas untuk menjalin hubungan antara politik, birokrasi dan masyarakat. *E-Government* atau dikenal dengan pemerintah digital atau pemerintah

*online* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerapkan *E-Government* dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Peran pemerintah Kabupaten Semarang sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya *website* resmi pemerintah, alamat dari *website* Kabupaten Semarang adalah [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id). Di dalam menjalankan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Di dalam menerapkan *E-Government* memerlukan sumber daya finansial yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan masyarakat. Adanya *E-Government* di lingkungan pemerintah sangat diperlukan, karena tuntutan akan membentuk pemerintahan yang bersih, efektif,

efisien dan transparan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak pemerintah yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar strategi untuk memenuhi keinginan publik dalam hal pemberian informasi publik dan mengarah untuk dapat memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah harus mempunyai unsur-unsur yang jelas dan tepat karena akan menentukan suatu sub pokok bahasan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalahnya yaitu, Bagaimana Manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Semarang, dan Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan *Electronic Government* di Kabupaten Semarang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses Manajemen *E- Government*, serta berbagai faktor yang mendorong dan menghambat penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang.

### **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1. Administrasi Publik**

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Syafiie, 2010: 13), Administrasi merupakan fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi, jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Arti dari *public* itu sendiri adalah sebagai

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie, 2010: 18).

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:8) mendefinisikan, Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

#### **2. Manajemen**

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti melatih (Syafiie, 2010:48).

Menurut G.R.Terry (dalam Umam, 2013:15), Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja,

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut James A.F.Stoner (dalam Hariani, 2013:6) mendefinisikan, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya, manajemen bukan hanya itu, dan tidak ada satu definisi pun yang dapat diterima secara universal.

Atas dasar uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

G.R. Terry yang menyatakan bahwa proses manajemen terdiri dari apa yang disingkat menjadi P.O.A.C. (Winardi, 2000, h.6-10). *Planning* (Perencanaan) proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang

tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. *Organizing* (pengorganisasian) proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. *Actuating* (menggerakkan) proses menggerakkan program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. *Controlling* (pengawasan) proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan digerakkan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.

### 3. *Electronic Government*

Zweers and Planque (dalam Gunawan, 2105:75) memberikan definisi, *E-Government* berhubungan dengan penyedia informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government* (dalam Gunawan, 2015 : 80-84) untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu :

#### 1. *Support*

Penerapan program *e-government* yang efektif harus mendapat dukungan, dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi hingga pemerintahan level bawah.

#### 2. *Capacity*

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government*

terkait menjadi kenyataan. Tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*.
- c. Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintahan tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *e-government*, karena banyak sumber daya dan fasilitas yang berada pada luar jangkauan pemerintah.

#### 3. *Value*

Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dan dalam hal ini yang

menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

#### **4. Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lebih lengkapnya Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila di pandang perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Gunawan, 2015:5-6).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif-kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif-kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Peneliti terjun langsung kelapangan, bertindak sebagai pengamat. Peneliti membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Manajemen *E-Government* di Kabupaten Semarang**

Analisis manajemen *Electronic Government* dilihat dengan menggunakan empat fungsi manajemen, dalam perencanaan penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Semarang masih berada pada tingkat persiapan. Penyusunan rencana induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang masih menunggu persetujuan dari pejabat publik dapat memberi sebuah gambaran bahwa di dalam proses perencanaan masih berjalan lamban. Selanjutnya tahap pengorganisasian

belum dilakukan dengan maksimal, karena SDM yang tersedia belum memadai jumlahnya, hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan tidak diimbangi dengan perekrutan pegawai baru dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, SDM yang tersedia belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan.

Tahap penggerakan atau pengarahan sudah dilakukan dengan adanya rapat koordinasi Organisasi Pemerintah Daerah tiap tahunnya, namun waktu yang tidak menentu, bisa terjadi tiga bulan sekali atau setahun sekali. Mengenai pemberian motivasi, semangat dan inspirasi kepada bawahan masih dikatakan kurang, karena hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemimpin akan pentingnya *Electronic Government* di suatu Pemerintah Daerah untuk menciptakan *good governance*. Pada tahap pengawasan saat ini pemerintah melakukan *Monitoring* dan *Evaluasi* terhadap sistem informasi. Hal ini dikarenakan perubahan sebuah sistem dari

manual ke digital sehingga masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan. Penerapan *Electronic Government* di suatu daerah memang tidak mudah, karena banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti contohnya pembuatan aplikasi di setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan aplikasi masih membutuhkan bantuan pihak ketiga, hal ini dapat menghambat proses penerapan *Electronic Government*.

## **B. Faktor Pendorong dan Penghambat penerapan *Electronic Government* di Kabupaten Semarang**

Faktor pendorong dan penghambat penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang dapat dilihat melalui elemen sukses pengembangan *E-Government*, faktor yang mendorong penerapan *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. *Value*, Penerapan *E-Government* di Kabupaten Semarang mempunyai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat maupun

pemerintah. Adanya *E-Government* lebih dapat dirasakan apabila warga masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakan alat (media elektronik), seperti handphone, laptop, komputer dan media lain.

Faktor penghambat penerapan *E-Government* adalah sebagai berikut:

- a. *Support*, Pemerintah Kabupaten Semarang menunjukkan satu langkah keseriusannya terhadap penerapan *E-Government* melalui dikeluarkannya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang *E-Government*, namun dukungan dari pejabat publik masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman dari pejabat publik mengenai penerapan *E-Government* untuk menjalankan pemerintahannya.
- b. Jumlah SDM yang kurang memadai sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan, SDM yang tersedia juga masih belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu SDM yang berbasis TIK.

- c. Sumber daya finansial masih terbatas, sehingga kurang maksimal dalam penerapannya. infrastruktur secara kuantitas sudah baik, namun secara kualitas masih kurang baik.

## **PENUTUP**

### **SIMPULAN**

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang berinisiatif menerapkan *Electronic Government*, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang di dalam menjalankan fungsi manajemennya terkait penerapan *E-Government*, bahwa inisiatif *E-Government* belum menunjukkan tahap kesempurnaan. Di dalam manajemen penerapan *E-Government* masih terdapat beberapa kelemahan yang dilihat dengan empat fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan, pada proses ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang masih mengalami kendala, yaitu rencana induk yang digunakan sebagai acuan rencana kerja



khususnya bidang TIK yang masih menunggu persetujuan untuk disahkan (Legalitas). Pada fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, pemilihan SDM yang akan ditugaskan sebagai pengelola *E-Government* seharusnya SDM yang berbasis TIK, namun kenyataan dilapangan masih belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah SDM yang tersedia juga masih belum memadai. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan, Menurut temuan lapangan, proses pembinaan dari atasan kepada bawahan di dalam menerapkan *E-Government* masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpin mengenai *E-Government* suatu pemerintahan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (*good governance*). Fungsi yang keempat adalah pengawasan. Kegiatan dalam *monitoring* dan evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu mendata Sumber daya manusia yang tersedia, pada kenyataan yang ditemukan dilapangan, SDM yang tersedia belum mampu mengelola sistem

informasi dengan baik, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum menjalankan proses evaluasi dengan maksimal, karena belum mampu meminimalisir hambatan yang ada dilapangan.

#### **SARAN**

1. Dinas komunikasi dan Informatika segera merencanakan pengelolaan *E-Government* agar bisa menuju proses selanjutnya, yaitu tingkat pematangan yang di dalam *website* terdapat interaksi, sehingga bisa mewujudkan proses pelayanan publik melalui penerapan *E-Government*.
2. Penyediaan SDM yang sesuai kebutuhan, dan harus adanya pelatihan dari ahli yang dikirimkan dari pemerintah pusat untuk staf yang menangani *e-Government*.
3. Pemerintah pusat hendaknya memberikan anggaran khusus dari APBD terkait penerapan *E-Government*, sebab untuk menerapkan *e-Government* harus memerlukan biaya yang sangat banyak. Ketersediaan sarana teknologi agar terus diperbaharui

lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ardianto, Elvinaro. (2010). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Athoillah, Anton. (2010). *Dasar Dasar Manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Hariani, Dyah. (2013). *Azaz-Azaz Manajemen*. Semarang : CV Majuno
- Gunawan, Cakti Indra. (2015). *Sistem Informasi Manajemen Dan E-Government*. Purwokerto : CV. IRDH
- Hartono, Bambang. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Umam, Khaerul. (2012). *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

Wijayanti, Irine Diana Sari. (2008). *Manajemen*. Jogjakarta: Mitra Cendikia Press

### Penelitian dan Jurnal

- Cristian, Harry. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1). Dalam [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal\(03-16-15-12-3914\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2015/03/E-jurnal(03-16-15-12-3914).pdf). Diunduh pada 14 Desember 2016 pukul 12.24 WIB
- Hardjaloka, Loura. (2014). Studi Penerapan E-Governmnet di Indonesia dan Negara lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di

- Sektor Publik, *Jurnal Rechts Vinding*. Dalam [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 8 JRV 3 NO 3 PROTECT.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_8_JRV_3_NO_3_PROTECT.pdf) Diunduh pada 8 Desember 2016 pukul 13.45 WIB
- Oktavya, Ayu Aditya. (2015). Penerapan (*Electronic Government*) *E-Government* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 3. Dalam [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL\\_AYU\\_fix\\_\(10-15-15-02-37-23\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_AYU_fix_(10-15-15-02-37-23).pdf) Diunduh pada 14 Desember 2016 pukul 17:33 WIB
- Arif, Muhammad Syaiful. (2013). Analisis Pengembangan *Electronic Government* Melalui Penyelenggaraan *Website* di Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Nindya, Maya. (2012). Analisis Manajemen Penanganan Keluhan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Noviana, Rina. (2015). Manajemen *e-Government* Berbasis Web Model *Government-to-Citizen (G2C)* Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, Alfian Adi. (2014). Analisis Pengembangan *E-Government* di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Regulasi:**
- Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)
- Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Bupati Semarang No. 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan *E-Government*

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Sumber Internet :**

Kabupaten Semarang dalam angka (2016) Dalam <https://semarangkab.bps.go.id/publication/2017/08/14/9ee69ab7c46de5593c087988/kabupaten-semarang-dalam-angka-2016.html> Diunduh pada tanggal 20 Oktober pukul 18.45 WIB

LKPJ Kabupaten Semarang 2013-2016 (2017) Dalam <http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/evaluasi-pembangunan/337-laporan-keterangan-pertanggungjawaban-bupati-semarang-tahun-2016.html> Diunduh pada tanggal 10 Maret Pukul 15.15 WIB

Penilaian Konten Informasi Publik Website PPID Utama Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (2017). Dalam <http://kipjateng.jatengprov.go.id> Diunduh pada tanggal 13 Maret Pukul 14.00 WIB